

Framing Kegagalan Pemerintah Pada Media Sosial Partai Keadilan Sejahtera Jelang Pemilu 2024

Diani Febrianti^{1*}, Eddi Kurnianto Saptawan²

Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

*diani.febrianti@students.paramadina.ac.id

Abstract

The 2024 Indonesian election campaign time has not officially started, but the fight for public sympathy and votes has already begun long before it. Candidates and Parties, already busy performing, either positive publicity for themselves, or negative campaign for the opposing party. This research aims to observe framing strategies that already appear on social media, ahead of the 2024 elections. The topic chosen was the framing of government failure, with the social media studied is the Instagram account of the Keadilan Sejahtera Party (PKS), which can be considered the government's opposition party. The data that will be discussed is content in June to July 2023 which is considered relevant enough to show PKS's political communication ahead of the 2024 elections. This article uses a descriptive qualitative research methodology with Entman model framing analysis. The focus of the research is problem identification, causal interpretation, moral evaluation, treatment recommendation, which appear in the Instagram content. The research conclusion states that there is indeed a framing of state failure in the content studied. PKS carried out framing which essentially explained that the government did not side with its citizens, and the government betrayed the community's mandate. This framing was also accompanied by strengthening the PKS political brand; "PKS is always with the People".

Keywords: Publicity, Framing, PKS, 2024 Election, Health Bill

Abstrak

Waktu resmi kampanye Pemilu 2024 belum lagi dimulai, namun perebutan simpati dan suara masyarakat sudah dimulai jauh sebelum waktu kampanye resmi, Kandidat dan Partai, telah mulai melakukan publisitas positif bagi diri mereka sendiri, maupun kampanye negatif kepada pihak lawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati strategi framing yang muncul di sosial media, menjelang Pemilu 2024. Topik yang dipilih adalah framing kegagalan pemerintah, dengan sosial media yang diteliti adalah Instagram dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang bisa dianggap partai oposisi pemerintah. Data yang akan dibahas adalah konten di bulan Juni dan Juli 2023 yang dianggap cukup relevan untuk menunjukkan komunikasi politik PKS menjelang Pemilu 2024. Artikel ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Entman, Fokus dari penelitian adalah *problem identification, causal interpretation, moral evaluation, treatment recommendation*, yang muncul dalam konten Instagram tersebut. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa memang terdapat framing kegagalan negara dalam konten yang diteliti, dengan menggunakan isu RUU Kesehatan. PKS melakukan framing yang intinya memaparkan bahwa pemerintah tak berpihak pada warganya, pemerintah mengkhianati mandat masyarakat dan melarikan diri dari kewajibannya. Framing itu sekaligus dibarengi dengan penguatan terhadap brand politik PKS yang intinya adalah PKS bersama Rakyat.

Kata kunci: RUU Kesehatan, Framing, PKS, Pemilu 2024, Pemilu Indonesia

PENDAHULUAN

Setiap menjelang pemilu, setiap partai politik pasti melakukan publisitas atau

kampanye yang bertujuan akhir untuk mendulang suara sebesar-besarnya. Untuk Pemilu 2024, ada perbedaan yang membuat

pemilu ini terasa berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu mayoritas pemilih adalah generasi Milenial dan generasi Z. Kedua generasi ini adalah pengguna sosial media yang aktif, maka tak heran dalam pemilu kali ini media sosial akan menjadi alat kampanye dan publisitas utama. Bagi partai politik, media sosial seperti Instagram dapat membantu sebagai sarana publisitas untuk meningkatkan dukungan dan popularitas.

Media sosial atau *social media* merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berkomunikasi dan membagikan konten baik berupa pesan teks, foto maupun video hingga siaran langsung atau *live streaming*. Seiring perkembangan teknologi, platform media sosial terus mengembangkan fasilitas atau fiturnya untuk mendukung kenyamanan penggunaannya agar tidak kalah saing dengan platform media sosial lain. Salah satu platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah *Instagram*. Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna Instagram global mencapai 1,32 miliar per Januari 2023. Jumlah tersebut menurun 10,8% dibanding Januari 2022 (*year-on-year/yoy*). Pada awal tahun 2023, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak ke-4 di dunia, yakni 89,15 juta pengguna (Annur, 2023)

Saat ini banyak partai politik dan politisi yang menggunakan Instagram sebagai salah satu media sosial utama mereka selain Facebook sebagai sarana komunikasi politik (Muhammad & Aminuddin, 2019). Publisitas partai di media menjadi krusial dalam membentuk persepsi publik (Yuda & Poltracking, 2014) Karena itu tak heran, meskipun waktu kampanye resmi untuk Pemilu 2024 belum tiba, namun penggunaan Instagram sebagai sarana komunikasi politik sudah dimulai. Beberapa partai politik telah menggunakan Instagram sebagai alat pencitraan maupun publisitas dari narasi politik mereka, diantaranya Partai

Keadilan Sejahtera atau PKS.

PKS cukup aktif di media sosial dan memiliki banyak pengikut (*followers*) di akun mereka. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023, Konstituen PKS dinilai yang paling aktif di media sosial yaitu sebanyak 57,1 persen dari responden yang ingin memilih PKS sebagian besar pun cukup intens dalam mengakses media sosial dalam sehari. Berdasarkan hasil survei, lebih dari 63 persen dari konstituen PKS mengaku selalu atau sering menggunakan media sosial tiap harinya (Prayoga, 2023). PKS memanfaatkan media sosial termasuk Instagram sebagai sarana publisitas dan kampanye dengan alasan efektivitas, efisiensi, dan biaya murah.

Sebenarnya PKS sejak pemilu 2014 telah menggunakan Media Sosial sebagai alat kampanye, namun saat itu fokusnya hanya Facebook, dan Twitter. Di tahun tersebut memang media sosial yang populer adalah Facebook dan Twitter. Namun bagi Milenial dan Gen Z yang menjadi target kampanye di pemilu 2024, facebook sudah kurang populer, sementara twitter yang masih berbasis teks (walau sudah bisa *embed* gambar dan video) kurang atraktif dan juga terus menurun popularitasnya. Strategi kampanye PKS di pemilu 2019 juga dibahas dalam berbagai artikel, misalnya manajemen citra PKS di pemilu 2019 (Siregar, 2020), atau Pemanfaatan Twitter oleh PKS jelang pemilu 2019 (Hijriawan, 2019). Namun, Siregar dalam tulisannya hanya memfokuskan pada citra PKS secara keseluruhan sehingga tidak membahas spesifik alat yang digunakan memperbaiki citra tersebut, sementara Hijriawan justru hanya membahas penggunaan Twitter, dari semua jenis media sosial yang ada.

Kegiatan kampanye partai ini relatif sering dibahas, karena PKS merupakan partai oposisi pemerintah atau pihak yang nyaris selalu berseberangan dengan pemerintah. PKS adalah partai pertama, terdepan, dan konsisten dalam bersikap

oposisi sepanjang dua periode masa jabatan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Kamarudin, 2021). Berdasarkan keterangan Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzammil Yusuf mengatakan PKS akan tetap konsisten menjadi partai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024. menyatakan PKS berperan aktif dengan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah (CNN Indonesia, 2022). Sesuai arah yang dipilih, PKS banyak menggunakan strategi kampanye negatif terhadap pemerintah untuk memperkuat elektabilitas kandidatnya dan mendorong citra partainya sebagai partai pembaharu. Salah satu strategi yang umum digunakan dalam kampanye negatif adalah Framing.

Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan di belokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis (Kartini et al., 2022). Dalam artikel ini akan digunakan teori *Framing* sesuai dengan model Entman. Dikutip dari Oxford Handbook of Political Communication, definisi framing menurut Entman (1993) “.. *is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text in such a way to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described*” (Kenski & Jamieson, 2017).

Proses pembentukan frame atau framing merupakan proses seleksi dari berbagai realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibanding yang lain. Entman juga menyertakan penempatan-penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain (Pinontoan & Wahid,

2020)

Framing menyertakan penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapat alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Maalej (2019) mengutip Entman yang menyatakan framing memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam mengkomunikasikan teks sedemikian rupa, untuk mengembangkan definisi masalah tertentu, interpretasi kasual, evaluasi moral dan/atau rekomendasi perawatan (penekanan pada aslinya) untuk item yang dijelaskan.

Eriyanto dalam tulisan Yudi Sudiana (Sudiana & Lestari, 2021) menjelaskan lebih detil mengenai 4 elemen dalam model Robert N. Entman yaitu: (1) *Define problems* (mendefinisikan masalah), yaitu cara melihat suatu isu/peristiwa dan sebagai masalah apa isu/peristiwa itu dilihat; (2) *Diagnose cause* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), yaitu tentang peristiwa itu dilihat sebagai apa serta siapa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah; (3) *Make moral judgement* (membuat keputusan moral), yaitu nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah dan nilai moral apa yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan; (4) *Treatment Recommendation* (rekomendasi penyelesaian), yaitu tentang penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu dan jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah. Keempat elemen itu akan menjadi alat untuk menentukan bagaimana framing yang ada di dalam posting Instagram PKS dalam penelitian ini.

PKS mengusung konsep kampanye dengan narasi "Bersama Melayani Rakyat" sehingga dalam setiap konten yang dipublikasikan memiliki makna dan menyiratkan keberpihakan PKS pada rakyat dan melakukan semuanya demi kesejahteraan rakyat. Menjelang Pemilu 2024, PKS juga terus melakukan publisitas sebagai partai oposisi pemerintah. Apalagi

calon yang didukung PKS yaitu Anies Baswedan, terus mendorong narasi untuk melakukan perubahan, yang berarti akan mengambil jalan berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Ide-idenya semua terkait dengan perubahan arah dan perbaikan kinerja pemerintahan saat ini, seperti: Memberantas ketimpangan antara pusat dan daerah, antisipasi urbanisasi dan Jakartanisasi, menciptakan lingkungan hidup layak, pengentasan kesenjangan sosial, dan pemerintahan kota mandiri dan *Transit Oriented Development*. Semua ide tersebut pada dasarnya menganggap arah pembangunan yang dilakukan saat ini tidak tepat, dan perlu ada perubahan untuk mewujudkan ide-ide tersebut (Rizky, 2023). Dengan kata lain, visi dan misi Anies Baswedan menarasikan bahwa untuk mencapai perubahan itu juga harus ada perubahan elit yang berkuasa. Jika rakyat ingin perubahan itu terjadi mereka harus mendukung Anies Baswedan dan elit politik serta partai yang ada di belakangnya. Tidak heran konten yang dipublikasikan di media sosial PKS seperti dalam Instagram @pk_sejahtera cenderung adalah kritik kepada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro pada rakyat.

Artikel ini akan berusaha melihat bagaimana Instagram digunakan sebagai sarana publisitas oleh PKS, menjelang pemilu 2024. Bagaimana cara PKS dan anggotanya mengangkat sebuah isu di Instagram, yang diharapkan mendukung narasi politik yang mendukung kampanye kandidatnya dan memperkuat pencitraan partai tersebut. Sesuai posisi PKS sebagai oposisi, maka narasi yang diriset adalah mengenai kegagalan pemerintah. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi politik, khususnya mengenai bagaimana framing di media sosial dilakukan. Dengan penekanan pada publisitas melalui media sosial, artikel ini diharapkan memberikan perspektif yang lebih baru dibanding artikel sebelumnya.

Khusus mengenai PKS, artikel ini diharapkan memberi kelanjutan informasi mengenai proses pencitraan yang dilakukan partai ini dari pemilu ke pemilu, dan menjadi landasan penelitian lain yang lebih komprehensif.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Ali dan Yusof mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai *“Any investigation which does not make use of statistical procedures is called “qualitative” nowadays, as if this were a quality label in itself”* (Sudirjo et al., 2023). Definisi dari Ali dan Yusof tersebut, menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Ulfah et al., 2022)

Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, dalam hal ini unggahan atau postingan PKS dalam instagram dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (postingan instagram PKS). Dalam penelitian ini mengambil data dari instagram PKS, yaitu @pk_sejahtera, dengan postingan mengenai penolakan PKS terhadap RUU Kesehatan

yang dinilai merugikan masyarakat.

Pada Juni dan Juli terdapat 115 postingan di Instagram PKS, total 81 postingan tentang partai, pencitraan dan kegiatannya. Serta 34 postingan berisi kritik pada program-program pemerintah. Dari 34 postingan kritis tersebut, 7 diantaranya tentang kesehatan keluarga. Hal itu menunjukkan perhatian PKS cukup besar pada isu-isu tersebut. Peneliti mengambil 4 postingan PKS mengenai penolakan RUU Kesehatan dalam rentan waktu 15 Juni-15 Juli 2023, karena pada saat tersebut DPR RI menggelar RDP membahas RUU Kesehatan di Komisi IX. Postingan Instagram PKS tersebut diambil dengan cara di screenshot (tangkap layar) kemudian dianalisis.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisa konten di media sosial Instagram PKS @pk_sejahtera berupa foto, dan *caption* untuk dianalisis, sehingga didapatkan hasil berupa penggambaran atau deskripsi maupun dalam bentuk tema. Data berupa konten yang dipublikasikan dalam media sosial Instagram PKS yang dianalisis perlu peneliti interpretasi untuk menangkap arti yang mendalam.

Sementara, paradigma penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah konstruktivisme/interpretif. Paradigma konstruktivisme diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Perspektif atau paradigma ini penting sebagai salah satu sudut pandang atau perspektif dalam melihat pembentukan gejala sosial atau realitas sosial. Mereka menuangkannya dalam bukunya yang berjudul "*the social construction of reality, the treatise in the sociology of reality*". Dalam merumuskan teorinya, Peter L. Berger mendapatkan donasi pemikiran dari Emile Durkheim (dalam hal fakta sosial), Max Weber, George Herbert Mead (teori interaksionisme simbolik yang juga tergolong alam tradisi sosiokultural), dan Alfred Schutz (Karman, 2015). Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial yakni pembahasan RUU

Kesehatan di DPR RI merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh sekelompok individu. Peneliti menganalisa dan meneliti kebijakan redaksi (humas PKS) yang diaplikasikan dalam Instagram PKS, perlu melihat realitas yang ada di dalam lingkungannya. Selain itu, perlu juga untuk menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi, dengan ikut berpartisipasi dalam lingkungan tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan disini menggunakan studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang dianggap sebagai sumber data untuk bahan analisis.

Dokumen yang digunakan adalah konten yang dipublikasikan dalam media sosial Instagram PKS @pk_sejahtera yang menjadi sumber data primer yang digunakan peneliti. Untuk mempertegas hasil penelitian, data yang akan dibahas adalah 4 konten di bulan Juni 2023 dengan topik berita yang sama, yaitu undang-undang kesehatan. Perkembangannya, data Juni adalah data yang cukup baru untuk diambil sebagai sampel komunikasi politik PKS menjelang Pemilu 2024. Selain itu, Juni 2023, juga setelah PKS resmi mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden partainya. Topik yang diambil adalah Undang-undang kesehatan, dimana PKS mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah, dan cukup kuat didukung oleh berbagai pernyataan anggota partai ini di media massa. Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi data dan bahan pertimbangan untuk menganalisa tulisan ini, baik dari buku-buku maupun tulisan dalam media massa yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada postingan Instagram @pk_sejahtera di bulan Juni, ditemukan

bahwa ada semacam tema yang diangkat secara berulang-ulang, yang terbanyak adalah tema RUU Kesehatan. Pola tersebut mirip dengan kebijakan redaksional dalam media tradisional, seperti TV atau majalah, yang dalam waktu tertentu akan memiliki fokus pada suatu tema tertentu. Dalam menentukan suatu postingan di Instagram PKS seolah-olah memang ada semacam kebijakan redaksional, yang dalam hal ini dibuat oleh tim Humas PKS, yang mengelola Instagram @pk_sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan kesimpulan Bayquni dan Saputra (Bayquni & Saputra, 2019) Mereka menyatakan dalam penulisan editorial, ada aturan atau prinsip dasar yang harus dipatuhi sebagai pedoman yang tertuang dalam kebijakan redaksi. Bahkan jika medianya adalah media sosial.

Kebijakan redaksional merupakan sikap dasar menghadapi persoalan yang berkaitan dengan penulisan hingga penyajian berita. Opini dari media bersumber kepada kebijakan redaksi yang dapat dianalogikan sebagai sebuah ideologi suatu partai politik yang harus menjadi dasar seluruh kegiatan jurnalistik. Kebijakan redaksi ditentukan oleh visi dan misi media massa, termasuk menyesuaikan dengan perekrutan untuk mempertahankan dan mengembangkan berita selaras dengan kebutuhan pemirsanya. Umumnya, pemimpin redaksi bertanggung jawab atas operasional keredaksian secara keseluruhan, tempat dimana kegiatan ini berlangsung (dapur redaksi).

Kebijakan redaksional itu terlihat dari isu yang beberapa kali muncul dalam postingan di kurun waktu yang berdekatan. Dalam kasus postingan mengenai RUU Kesehatan, bahkan terlihat seolah-olah postingan itu saling terkait, dan membentuk framing tertentu pada isu tersebut.

Untuk melihat framing dalam postingan Instagram PKS tersebut, perlu dilihat empat elemen framing menurut model Entman pada setiap publisitas dalam Instagram @pk_sejahtera, yaitu; Mendefinisikan masalah (*problem identification*), penyebab

masalah (*causal interpretation*), evaluasi moral (*moral evaluation*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*).

Problem Identification

Peristiwa yang diangkat dalam postingan Instagram PKS itu adalah pembuatan rancangan UU Kesehatan. Pemerintah menganggap RUU itu diperlukan untuk memperbaiki perangkat pelayanan kesehatan Indonesia, Namun PKS justru mengangkat proses pembuatan peraturan perundangan itu sebagai sebuah masalah yang potensial merugikan masyarakat.

PKS sebagai partai oposisi yang bertugas menyeimbangkan pemerintahan dan mengkritisi jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan atau tidak menyejahterakan rakyat. PKS dengan vokal mengkritisi dan memiliki *concern* terhadap RUU Kesehatan ini. Salah satu cara kritisi yang dilakukannya PKS adalah mempublikasikannya di media sosial, Instagram.



Gambar 1. Postingan 20 Juni (a) Instagram @pk_sejahtera



Gambar 2. Postingan 20 Juni (b) Instagram @pk_sejahtera

Gambar 1 dan Gambar 2 adalah hasil tangkapan layar Instagram @pk_sejahtera tanggal 20 Juni 2023. Keduanya diposting berurutan, dengan gambar 1 lebih dulu beberapa jam dari gambar 2.

Keduanya juga pada dasarnya berisi beberapa poin yang sama, yaitu pernyataan tentang isu yang diangkat; ‘Pemerintah hapus anggaran minimal kesehatan’, pernyataan tentang narasi yang disuguhkan PKS tentang pemerintah; ‘tidak berpihak pada rakyat’ dan identitas anggota DPR RI yang mengangkat isu tersebut, yaitu Dr. Hj. Netty Prasetyani, Msi. Perbedaan kedua postingan itu hanya gambar *background*-nya. Gambar 1 menggunakan gambar *background* rapat DPR, dengan tulisan di latar depan Netty Prasetyani. Di bawahnya nama dan gelar lengkap Netty Prasetyani. Gambar 2 menggunakan *background* wajah profil samping sang anggota DPR, Netty Prasetyani, dengan teks yang serupa.

Netty Prasetyani adalah anggota DPR RI komisi IX yang cukup aktif mengomentari masalah kesehatan. Ia merupakan kader PKS dan istri Ahmad Heryawan, mantan Gubernur Jawa Barat periode 2008–2018. Netty cukup vokal mengkritik berbagai kebijakan kesehatan pemerintah, seperti 22 November 2022 saat ia mengomentari kelambanan pemerintah menangani kasus kematian beruntun anak-anak akibat kerusakan ginjal. Ia juga beberapa kali menggelar pertemuan dengan insan pelayanan kesehatan terkait RUU kesehatan yang saat itu sedang digodok pemerintah. Penempatan Netty sebagai ‘juru bicara’ PKS dalam isu UU kesehatan, di Instagram mereka, mungkin dikaitkan dengan pencitraan Netty selanjutnya sebagai kader PKS yang potensial untuk terus naik.

Dengan menuliskan narasi “Pemerintah hapus anggaran minimal Kesehatan”, pernyataan; ‘tidak berpihak pada rakyat’, Instagram PKS ini memperkuat kritik yang dilakukan kader-kader PKS dalam rapat DPR RI mengenai (saat itu) RUU Kesehatan. Di dua postingan

tersebut, jelas PKS berusaha menjelaskan bahwa RUU Kesehatan yang dibuat pemerintah adalah hal yang bermasalah, dengan masalah terbesar adalah kemungkinan penghapusan batasan anggaran minimal kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang itu. Menurut PKS, tindakan itu potensial menyebabkan meningkatnya biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat. Tindakan itupun di cap sebagai dianggap tidak berpihak pada masyarakat. Pada Gambar 3. dan Gambar 4. Tidak dicantumkan lagi nama Netty Prasetyani, walaupun masih menggunakan fotonya sebagai latar belakang. Isi dari postingan itu juga sedikit lebih detil membahas isu rencana revisi UU Kesehatan itu, sekaligus menunjukkan bahwa itu adalah pendirian dari PKS sebagai sebuah partai dan bukan sekedar pendapat Netty Prasetyani. Meski begitu, tetap ada penekanan pada dua hal yang menjadi narasi penolakan, yaitu penghapusan *mandatory spending* dan pemerintah tak berpihak pada rakyat. Dua hal itu adalah masalah utama yang diidentifikasi dalam publisitas Instagram PKS.

Penjelasan lebih detail mengenai masalah tersebut, diperkuat dalam konten selanjutnya. Konten tanggal 11 Juli 2023, dalam Instagram @pk_sejahtera berbentuk gambar yang berisi alasan PKS menolak RUU Kesehatan, seperti terlihat di Gambar 3. Ada 4 alasan yang dicantumkan dalam gambar dan kolom komentar, yaitu; (1) RUU Kesehatan menghapus Anggaran Wajib Minimal Kesehatan (*mandatory spending*). (2) Pembahasan RUU Kesehatan tergesa-gesa, membuat tidak tercapai faktor partisipasi yang bermakna. (3) RUU Kesehatan akan menyebabkan over regulasi. (4) Negara lepas tanggungjawab kepada warga negaranya sendiri saat kondisi wabah, dan malah menghapus pasal 52 ayat (1), pasal 55 ayat (1) dan pasal 58 tentang karantina kesehatan.



Gambar 3. Postingan 11 Juli 2023 Instagram @pk_sejahtera

Tiga alasan pertama terkait dengan resiko dan kelemahan RUU Kesehatan yang baru, namun poin keempat lebih merupakan narasi yang diusung PKS untuk menunjukkan kegagalan pemerintah.



Gambar 4. Postingan 12 Juli 2023 Instagram @pk_sejahtera

Isu yang sama diangkat kembali di akun @pk_sejahtera tanggal 12 Juli 2023. Seperti terlihat di Gambar 4. Kali ini yang dimunculkan adalah pernyataan resmi PKS. Video Instagram @pk_sejahtera pada 12 Juli 2023 itu menunjukkan salah satu kader yang juga menjadi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani, mewakili Fraksi PKS dalam rapat DPR RI menyampaikan keberatan atas RUU kesehatan. Ia menyampaikan pendapat bahwa RUU Kesehatan jika disahkan menjadi tanda kemunduran kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Lebih jelasnya, dalam caption postingan video tersebut menjelaskan pernyataannya:

“PKS TOLAK PENGESAHAN RUU KESEHATAN!!
Fraksi PKS berpendapat ditiadakannya pengaturan alokasi wajib anggaran (mandatory spending) kesehatan dalam RUU Kesehatan merupakan sebuah kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.
Kebutuhan dana kesehatan Indonesia sebagai negara berkembang, justru meningkat dari waktu ke waktu karena makin kompleksnya masalah kesehatan dimasa mendatang.
Fraksi PKS berpendapat bahwa Mandatory Spending penting untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang

RUU Kesehatan merupakan sebuah kemunduran bagi upaya menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

Dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 sebelumnya, mengatur alokasi dana kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar masing-masing sebesar 5% dan 10%, di luar gaji. Kebutuhan dana kesehatan Indonesia sebagai negara berkembang, justru meningkat dari waktu ke waktu karena makin kompleksnya masalah kesehatan dimasa mendatang.

Fraksi PKS berpendapat bahwa Mandatory Spending penting untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup. Dengan adanya Mandatory spending, maka adanya jaminan anggaran kesehatan dapat teralokasi secara adil dalam rangka menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga, Mandatory Spending merupakan bagian penting dalam RUU ini.”

Lebih lanjut, caption postingan tersebut menjelaskan dihapuskannya *Mandatory Spending* (Anggaran yang Diamanatkan) dari APBN untuk sektor kesehatan sebagai inti masalah yang dianggap PKS sebagai sebuah langkah mundur. Langkah mundur, juga sebuah narasi yang muncul beberapa kali postingan instagram itu, baik dalam video pidato, visual postingan maupun di kolom komentar.

Causal Interpretation

Masalah pada RUU kesehatan bukan hanya pembatasan *monetary spending*. Kembali ke gambar 3. dimana postingan tersebut menjelaskan lebih terinci lagi 4 poin alasan PKS menolak RUU Kesehatan, yang sudah disampaikan di atas. Jika diperhatikan, poin pertama sampai ketiga berisi alasan yang terkait fakta, kenapa RUU Kesehatan itu dianggap sebuah produk kebijakan yang tidak bijak dari pemerintah.

Namun poin keempat justru dimulai dengan sebuah narasi, yang sepertinya merupakan kesimpulan dari keseluruhan postingan di instagram tersebut; Negara lepas tanggungjawab kepada warga negaranya sendiri. Ini menunjukkan bahwa PKS mencoba mengarahkan alasan terjadinya masalah ini (RUU Kesehatan) adalah karena Negara mencoba melepaskan tanggungjawabnya pada warga negaranya sendiri.

Secara tidak langsung, ada dua hal yang dianggap sebagai penyebab kehadiran RUU Kesehatan yang bermasalah ini, versi PKS, yaitu; karena Negara mencoba melepaskan tanggungjawabnya pada warga negaranya sendiri dan -seperti disampaikan dalam postingan di Gambar 1, 2 dan 3- negara tidak berpihak pada rakyat.

Di postingan berikutnya, seperti muncul di Gambar 4, PKS menarasikan bahwa jika RUU itu disahkan maka itu adalah sebuah langkah mundur. Kebijakan RUU kesehatan ini dilukiskan tidak berpihak pada pembangunan sektor kesehatan yang dapat diakses seluruh rakyat. Pernyataan itu tentudisampaikan secara sengaja dan sistematis, sesuai redaksional untuk memperkuat narasi kegagalan pemerintah di postingan sebelumnya.

Moral Evaluations

PKS menyampaikan pendapatnya kebutuhan dana kesehatan Indonesia sebagai negara berkembang, justru meningkat dari waktu ke waktu karena makin kompleksnya masalah kesehatan di masa mendatang, sehingga *Mandatory Spending* penting untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup. Selain itu, dalam poin kedua alasan penolakan PKS (gambar 4.) dikatakan RUU ini akan menimbulkan *over regulasi*. Penambahan dan pengurangan beberapa item dalam RUU itu, mengharuskan dibuatnya puluhan atau bahkan ratusan peraturan penjelasan untuk membuat RUU

itu bisa dijalankan. Versi PKS, *over regulasi* kemungkinan besar akan menimbulkan *over birokrasi* juga, dan ujungnya hanya memberatkan masyarakat. Jika pemerintah mencoba mengabaikan hal itu dalam membuat RUU Kesehatan, maka negara layak dikatakan sebagai tidak berpihak pada rakyat.

Pemerintah juga dianggap tidak berpihak pada rakyat dan melepaskan diri dari tanggungjawab melindungi rakyat, saat menghapus beberapa pasal dalam RUU kesehatan, yang sangat diperlukan saat pandemi. Tambahan ini cukup menguatkan karena Indonesia baru saja mengalami dua tahun pandemi saat RUU ini dibuat.

Penilaian moral juga diarahkan PKS pada proses pembuatan RUU yang terburu-buru. Padahal sebagai pembuat keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan semua pihak yang terkait. Semua pihak itu berhak memberikan pertimbangan dan pendapat. Dengan proses terburu-buru, hak itu dilanggar, dan karenanya pemerintah (atau dianalogikan sebagai negara dalam postingan) bisa dianggap mencoba melepaskan tanggungjawabnya pada hak warga negaranya sendiri. Secara sederhana isi dari penilaian moral dalam publisitas Instagram PKS adalah; pemerintah dan negara ada dalam posisi yang salah karena tak peduli rakyat dan mencoba melepaskan diri dari tanggungjawabnya, sedangkan PKS yang peduli pada rakyat, ada di posisi yang benar.

Treatment Recommendation

PKS mendorong RUU Kesehatan tidak disahkan, karena negara tidak boleh lepas tanggungjawab atas amanat konstitusi untuk menjamin kesehatan rakyat apalagi dengan alasan tidak tersedia dana atau alasan lain. Di sisi lain, setelah menunjukkan bagaimana negara tidak memihak warga dan telah melakukan pengingkaran terhadap tanggungjawabnya melindungi warga, PKS sekaligus menunjukkan bahwa adalah partai yang konsisten dalam berpihak pada

masyarakat dan berani bersuara melindungi warga.

Jika masalahnya adalah negara, maka untuk mencegah terjadi lagi ketidakadilan itu, maka pilihlah PKS dalam pemilu mendatang. Pesan yang disampaikan secara samar dalam hashtag #pksnomor8 yang ada dalam postingan Instagramnya (Gambar 1. Dan Gambar 2.). Nomer 8 adalah nomer urut PKS dalam pemilu selanjutnya yaitu tahun 2024. Pesan halus itu menunjukkan niat politis dari postingan tersebut, yaitu menaikkan elektabilitas PKS dalam pemilu selanjutnya.

Framing dalam Konten Instagram PKS

Menurut Eriyanto yang dikutip Suidiana; analisis framing model Entman melihat *Framing* dalam dua dimensi besar yaitu; seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu itu. ada dua aspek yang harus dilakukan dalam framing, pertama, memilih fakta/realitas (Suidiana & Lestari, 2021:18). Dalam proses seleksi isu atau memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, siapapun yang mengetahui sebuah fakta dan akan menyampaikannya, tak mungkin melihat fakta atau peristiwa itu tanpa perspektif. Selalu ada pilihan, mana fakta yang diambil dan mana fakta yang dibuang. Setelah itu saat menyampaikan fakta itupun ada pilihan, mana yang diperkuat, diberi penekanan, dan mana dikaburkan.

Dalam kasus Instagram PKS yang dibahas, isu yang dipilih adalah isu nyata, yaitu pembentukan RUU Kesehatan. Namun, PKS memilih mengambil bagian-bagian yang dianggapnya sebagai kelemahan RUU tersebut dan memilih menghilangkan isu perbaikan yang dilakukan dalam RUU itu. Dalam pemaparan fakta pada masyarakatpun PKS membuat positioning yang bertolak belakang dengan pemerintah. Tentunya yang menguntungkan citra partai tersebut. Hal itu menunjukkan PKS melakukan framing dalam publisitas media sosialnya, yaitu

Instagram.

Dalam publisitas di Instagram, dalam isu RUU Kesehatan, PKS melakukan beberapa framing pada pemerintah. Framing tersebut adalah bahwa dengan pembuatan RUU Kesehatan, pemerintah telah berusaha melepaskan diri dari tanggungjawab terhadap warganya. Framing dilakukan dengan memilih beberapa bagian dari RUU Kesehatan yang kontroversial, yaitu pembuatannya yang terburu-buru sehingga tak memberikan kesempatan seimbang pada seluruh pihak yang harusnya terlibat dalam pembentukan undang-undang tentang kesehatan. Selain itu juga *mandatory fund* yang dikurangi, kemungkinan munculnya *over regulasi* yang digambarkan PKS akan merepotkan warga yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan. Dengan fokus pada beberapa isu dalam pembuatan RUU tersebut, PKS ingin memberikan penekanan ketidakberesan proses pembuatannya, dan bahwa semuanya merugikan rakyat yang artinya 'negara tidak memihak rakyat'.

Selain melakukan framing 'pemerintah tidak memihak rakyat,' PKS juga berusaha menunjukkan bahwa partai itu menentang pemerintah demi warga negara. Hal ini konsisten dengan positioning PKS selama ini yang memang cenderung oposisi dengan pemerintahan. Saat menyampaikan isu RUU Kesehatan dengan framing seperti di atas, ditambah dengan menggunakan hashtag #pkspembelarakyat dan mengambil sudut pandang bahwa yang dilakukan fraksi PKS di DPR RI itu adalah demi rakyat, maka PKS telah membuat narasi hitam putih tentang pemerintah dan PKS; pemerintah/negara tidak memihak rakyat sementara PKS adalah pembela rakyat.

Pencitraan (branding) dalam Publisitas Kritis PKS

Dalam publisitas di Instagram, PKS ternyata tidak sekedar melakukan framing, tapi juga membentuk citra diri (branding) sebagai partai oposisi yang sekaligus memihak rakyat. Peranan media sosial

seperti instagram menjadi penting, karena dianggap mampu mendongkrak suara secara signifikan bahkan membentuk opini bahkan *political branding*. Apalagi di Pemilu 2024 yang sebagian besar pemilihnya adalah generasi z dan millennial.

Heryanto (2018) mengatakan *Branding* dalam konteks pemasaran politik, lebih merupakan upaya strategis mengembangkan identitas untuk menarik perhatian dan minat masyarakat agar lebih mengenal produk politik (Heriyanto, 2018:94). *Branding* politik dapat membantu partai politik untuk mendulang dukungan, mengubah dukungan, dan mempertahankan dukungan, *image* atau citra atau reputasi yang dimilikinya.

Publikasi PKS di media sosial seperti Instagram semakin masif menjelang pemilu 2024, untuk melakukan mengontrol dan mengimbangi (*check and balances*) terhadap jalannya sistem pemerintahan Indonesia,. Dalam melakukan publisitas di media sosial Instagram, PKS tetap melekatkan citra sebagai partai oposisi yang bertugas sebagai *check and balances* terhadap pemerintah. PKS konsisten memberikan kritik ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggapnya tidak menguntungkan rakyat. Hal ini sesuai jargon PKS yaitu "Bersama Melayani Rakyat".

Dalam publisitas di Instagram, PKS jugacukup menonjolkan kritik terhadap pemerintah. Pada dua bulan penelitian ini dilakukan (Juni dan Juli 2023) dari 115 postingan di instagram @pk_sejahtera, 34 diantaranya berisi kritik pada pemerintah. Salah satunya terkait RUU Kesehatan yang dikatakan jika disahkan tidak berpihak pada rakyat, bahkan disebut mengkhianati rakyat yang mempercayakan kesejahteraannya pada pemerintah melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. PKS dengan publisitasnya, mencoba memperkuat *branding* bahwa PKS adalah partai yang memihak rakyat dan konsisten sebagai partai oposisi yang terus mengawasi pemerintah, untuk membela kepentingan rakyat.

Branding tersebut ditampilkan melalui publisitas PKS dalam media sosialnya, yang juga kerap menggunakan hashtag "PKS Pembela Rakyat" (Gambar 1 dan Gambar 2). Hal itu seolah mempertegas *positioning* yang berusaha diambil PKS yaitu sebagai partau yang aktif membela dan berjuang bersama rakyat.

SIMPULAN

PKS melakukan framing pada pemerintah dalam konten Instagram di bulan Juni sampai Juli 2023. Isu yang digunakan adalah RUU Kesehatan. Dengan memilih kekurangan dan kelemahan yang ada dalam RUU Kesehatan itu, dalam akun instagramnya, PKS melakukan framing yang intinya adalah pemerintah tak berpihak pada warganya. Dengan framing seperti itu, dan sekaligus konsisten pada sikap oposan pada pemerintah, PKS bisa menempatkan posisinya sebagai lawan dari pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat, dengan kata lain, PKS bisa menyebut dirinya partai yang berpihak pada rakyat. Hal ini sesuai jargon PKS yaitu "Bersama Melayani Rakyat".

Dalam melakukan publisitas di media sosial Instagram, PKS tetap melekatkan citra sebagai partai oposisi yang bertugas sebagai *check and balances* terhadap pemerintah. PKS konsisten memberikan kritik ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggapnya tidak menguntungkan rakyat. Selain Framing, PKS juga membentuk citra diri (*branding*) sebagai partai oposisi yang sekaligus memihak rakyat. Berbagai jargon diselipkan baik dalam orasi anggotanya ataupun hashtag dalam postingan Instagram, diantaranya hashtag #pkspembelarakyat.

Tujuan tersirat dalam pemanfaatan Instagram sebagai alat komunikasi politik ternyata tetap pada elektabilitas. Hashtag #pksnomor8 misalnya, adalah upaya komunikasi PKS agar simpatisannya yang mengikuti Instagram tetap ingat dan memilih PKS di nomor urut 8 pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023, May 4). *Jumlah Pengguna Instagram Indonesia Terbanyak ke-4 di Dunia*. Katadata.Co.Id.
- Bayquni, & Saputra, A. A. (2019). Kebijakan Redaksi Media Sosial Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jakarta Timur Dalam Menentukan Pemberitaan. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 2(2), 131–142.
- CNN Indonesia. (2022, October 28). *PKS Tegaskan Bakal Terus Jadi Oposisi Pemerintahan Jokowi*. Cnnindonesia.Com.
- Heriyanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik, Relasi Kuasa Media di Panggung Politik* (1st ed., Vol. 1). IRCiSoD.
- Hijriawan, H. T. (2019). Pemanfaatan Twitter Oleh Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Jelang Pemilihan Umum 2019. *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Kamarudin. (2021, November 28). *Oposisi Politik*. Pks.Id.
- Karman. (2015). Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger). *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 5(3), 11–23.
- Kartini, K., Br Hasibuan, R. M., Rahmadina, A., & Sinaga, N. S. (2022). Metode Analisis Framing dalam Media Sosial. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2).
- Kenski, K., & Jamieson, K. H. (Eds.). (2017). *The Oxford Handbook of Political Communication*. Oxford University Press.
- Maalej, D. (2019). *Media Agenda-Setting and Framing in the Second Gulf War*. Cambridge Scholar publishing.
- Muhammad, N., & Aminuddin, A. (2019). Peran Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Anggota DPR RI Pada Akun @Sartono hutomo). *Pantarei*, 3(4).
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas.Com Dan Jawapos.Com. *Komuniti*, 12(1), 11–24.
- Prayoga, F. (2023, February 21). *Survei Litbang Kompas: PKS Partai Politik yang Paling Aktif di Media Sosial, Mencapai 57,1 Persen*. Kompas.Com.
- Rizky, M. (2023, July 14). *Anies Beberkan 6 Ide Capres 2024, Ini Bocoran-Bocorannya*. Cnbcindonesia.Com.
- Siregar, F. A. (2020). Manajemen Citra PKS Di Pemilu 2019. *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Sudiana, Y., & Lestari, A. T. (2021). Analisis Framing Robert N. Entman Pada Pemberitaan Pernyataan Kontroversi Megawati di Kompas.com. In H. Zaid, Y. Sudiana, & R. S. Wibawa (Eds.), *Teori Komunikasi dalam Praktik* (pp. 15–24). Zahira Media Publisher.
- Sudirjo, F., Harto, B., Fauzan, R., Hapsara, O., Aprizal, Wasil, M., Sanjayyana, A. R., Putra, T. A. E., & Nuryadi, A. M. (2023). *Riset Pemasaran*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ulfah, A. K., Muqoddam, F., Razali, R., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Yusup, M., Rahman, H., & Inderawati, R. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. IAIN Madura Press.
- Yuda, H., & Poltracking. (2014). *Jejak para pemimpin*. Gramedia Pustaka Utama.